

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMITMEN KARYAWAN, DAN PERAN
INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)

Artikel Ilmiah

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu



Oleh:

WATI SRI NOVA

16101/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMITMEN KARYAWAN
DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)**

Oleh :
Wati sri Nova
16101 / 2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/ditetujui oleh kedua pembimbing.

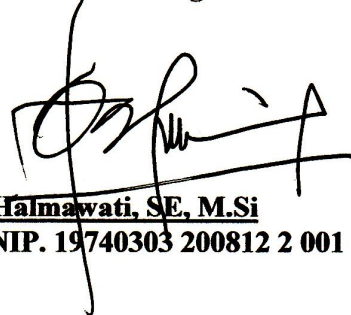
Padang, Februari 2015

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199003 1 003

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMITMEN KARYAWAN DAN PERAN INTERNAL AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung)

WATI SRI NOVA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

Email: Wati_srinova@yahoo.com

ABSCTRACT

This study aims to test (1) The influence of undersanting of accounting on the quality of local financial statement (SKPD) (2) The influence employee commitment on the quality of local financial statements. (3) The influence of the role of internal audit of the quality of local government financial statement.

This research is causative. The population is 32 SKPD in regency of sijunjung. The type of data is the primary data reseach. Data analysis techniques is using multiple linear regression.

The results of this study indicate: (1) The influence of understanding of accounting on have not significant possitive effect on the quality of local government financial statements. (2) The influence employee commitment on have not significant positive effect on the quality of local government financial statement. (3) The influnce of the role of internal audit have significant possitive effect on the quality of local government financial statement.

Suggestion for this study include: (1) For government to do review about the understanding of accounting, the employee commitment, the role of internal audit in make financial statement which are increasing the quality of local government. (2) Subsequent research caan expand the variables of study by adding other variables.

Key word: quality of local government financial statement, employee commitment and the role of internal audit.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pengaruh komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian adalah penelitian kausatif. Populasi adalah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sijunjung. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahawa: (1) Pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Komitmen karyawan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah. (3) Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan pengajian ulang mengenai pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit dalam pembuatan laporan keuangan agar kualitas laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. (2) Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel penelitian dengan menambahkan variabel lain.

Kata kunci: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, peran internal audit.

1. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan dari reformasi keuangan daerah.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan, maka perlu dilakukan perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan dapat berjalan dengan baik. Perubahan tersebut nantinya akan menghasilkan informasi keuangan daerah yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Salah satu perubahan di bidang akuntansi yang cukup signifikan adalah perubahan di bidang sistem akuntansi pemerintah daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka tata kelola keuangan tersebut harus dilakukan berdasarkan *good governance* yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Suwardjono (2005) menyatakan bahwa tujuan utama dalam pelaporan keuangan organisasi non bisnis seperti unit-unit pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitasnya, menyajikan informasi yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah

memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Adapun komponen laporan keuangan terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3) Neraca; 4) Laporan Arus Kas; 5) Laporan Operasional; 6) Laporan Perubahan Ekuitas; 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Supaya laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka diharapkan laporan keuangan tersebut harus berkualitas. WTP adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut Safrida (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Bastian (2010: 318) bahwa tahapan proses akuntansi meliputi transaksi, analisis bukti transaksi, mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat (*posting*) dan penerbitan laporan dan catatannya.

Roviyantie dalam Dian (2014) menyebutkan bahwa Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Komitmen merupakan keadaan individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Dalam instansi pemerintah sangat dibutuhkan komitmen karyawan dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, serta untuk pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintah, agar tercipta loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Menurut Rodwel dalam Meriem (2014) komitmen karyawan adalah suatu kondisi dimana pegawai memiliki unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai-nilai dalam tujuan organisasi. Bahwa disini komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadi organisasi lebih baik.

Dalam instansi pemerintah komitmen merupakan sikap yang menggambarkan kemauan dan kemampuan seseorang untuk menyelaraskan perilaku pribadi dalam mempengaruhi dan mengarahkan sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Menurut Sopiah (2008) ada tiga indikator komitmen karyawan yaitu: komitmen afektif, komitmen kontiniu, dan komitmen normatif.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah peran internal audit. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Menurut *Institute Of Internal Auditor* (1999) dalam Safrida (2010) disebutkan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal audit membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Peran internal audit yaitu memberikan jasa konsultasi dan jaminan mutu (*quality assurance*) terhadap laporan keuangan khususnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Inspektorat berperan dalam melakukan pemeriksaan

terhadap pengelolaan keuangan masing-masing SKPD mulai dari sistem pencatatannya sampai pada pelaporan keuangannya. Dari pemeriksaan ini, inspektorat akan memberikan masukan untuk koreksi bagi instansi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki keandalan informasi dan sesuai dengan SAP.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar sudah menyerahkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdapat 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat (sumbar) mendapat opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian) menurut Betty Ratna Nuraeni selaku Kepala Badan Keuangan (BPK-RI). Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2012 (*Sumber.hariansinggalang.co.id*) 23 Agustus 2013.

Dengan mengacu pada fenomena di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Sijunjung. Hal ini tercermin dari opini yang dikeluarkan oleh BPK yang mana laporan keuangan Kabupaten Sijunjung masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Dengan demikian maka diharapkan kedepannya kualitas laporan keuangan Kabupaten Sijunjung dapat ditingkatkan sehingga kualitas laporan keuangan yang diharapkan tercapai yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

Safrida (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang

dilakukan pada pemerintah daerah yang dilakukan pada 35 SKPD yang berada di Kota Banda Aceh. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa perubahan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan harus didukung dengan kemampuan sumber daya yang memadai, salah satu adalah meningkatkan pemahaman yang cukup mengenai pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat banyak pegawai yang masih rendah pemahamannya terhadap tugas dan fungsinya serta hambatan dalam pengelolaan keuangan juga dapat berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, salah satunya adalah keterlambatan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meriem (2014) yaitu meneliti tentang pengaruh komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan dia menyatakan bahwa komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ricko (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh peran internal audit, produktifitas pegawai, dan efisiensi penggunaan *software* akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Padang. Menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang belum mampu melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif. Hal ini terlihat dari rekomendasi dan temuan BPK bahwa masih ada terdapat beberapa temuan dalam laporan keuangan pemerintah. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya peran internal audit dalam mereviu laporan keuangan pemerintah.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu pemahaman akuntansi, dan peran internal audit, serta adanya penambahan variabel baru yaitu komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada masing-masing SKPD yang terdapat di Kabupaten Sijunjung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta dengan melihat fenomena yang terjadi tentang rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sijunjung yang di buktikan dengan hasil audit BPK yang memberikan opini WDP, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung)”**

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Sejauhmana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengaruh komitmen karyawan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Sejauhmana pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh karyawan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan yang berguna

untuk meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi masing-masing SKPD.

3. Akademisi menambah wawasan bagi dunia akademik dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka kualitas laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan.

Menurut Bastian (2006) karakteristik utama kualitatif informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahan untuk dipahami pemakai. Dengan maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi, serta mempunyai kemauan untuk belajar tentang informasi akuntansi yang disampaikan. Dengan demikian, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan sektor publik, tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum.

Menurut SAP (2005) terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Pemahaman Akuntansi

Menurut Jorge (*wordpress.com*) pemahaman adalah proses dari awal sampai selesai dari usaha memperoleh hasil makna tersebut. Dimulai dari interaksi antara seseorang dengan objek yang dikaji : mulai dari objek itu ditangkap oleh panca indera, kemudian disalurkan ke dalam otak, dipikirkan, dipertanyakan, diolah sampai dikeluarkan hasil olahannya menjadi makna. Pemahaman merupakan suatu proses panjang dan bersifat individual. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya.

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau

memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun proses/siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010: 318) dalam Dian 2014 adalah sebagai berikut:

1) Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3) Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (*Posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.

5) Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

3. Komitmen Karyawan

Menurut Soekidjan (2009) komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara pengembangan tujuan dan memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi.

Menurut Sopiah 2008, ada tiga komponen komitmen :

1) *Affective commitment*

Affective commitment merupakan proses perilaku dimana orang berfikir mengenai hubungan dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai individual akan secara langsung mempengaruhi keinginan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi.

2) *Continuance commitment*

Pengertian *continuance commitment* didasarkan pada keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi pemerintahan, sebagai bagian dimana karyawan secara psikologis terikat dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi pemerintahan. Biaya yang dimaksud dimanifestasikan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, masa kerja individu dalam organisasi pemerintahan yang mereka rasakan akan menumbuhkan loyalitas terutama dengan adanya program pensiun, senioritas, spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan keluarga yang akan merugikan mereka jika berpindah organisasi. Kedua, individu bisa merasakan mereka berfikir untuk tetap tinggal dalam organisasi karena

tidak punya alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

3) *Normative commitment*

Adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepada bawahannya. Bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif manajer publik mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi tempat bekerjanya.

Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi. Komitmen pada organisasi pemerintahan melibatkan tiga sikap manajer yaitu:

- 1) Keinginan karyawan untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan.
- 2) Karyawan merasa terlibat dalam kewajiban organisasi pemerintahan.
- 3) Adanya loyalitas karyawan yang tinggi terhadap organisasi pemerintahan.

4. Peran Internal Audit

a. Pengertian Peran Internal Audit

Menurut *The Institute of Internal Auditor* (1999) peran internal auditing adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Selanjutnya menurut Wahyudi dalam Ricko (2012) terwujudnya *public accountability* dapat terwujud dengan adanya sistem dari pihak yang mereviu laporan keuangan dan menuntut adanya Jasa

konsultansi yang merupakan pemberian saran, dan umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari klien (para auditi).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang mempunyai nilai dan bebas dari kesalahan yang material, hal ini akan terwujud apabila ada peran internal audit dalam mencapai tujuan dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sawyer's (2005:10) menggambarkan lingkup audit internal modern sebagai sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif.

Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah yang berada di bawah bertanggungjawab kepada Walikota. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.

b. Peran Internal Audit Pemerintah (Inspektorat)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari inspektorat adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi:

a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur Dan Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

c. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi

Pengawasan intern dilakukan oleh inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana
- 3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah
- 4) Menentukan efesiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah

d. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran inspektorat selaku internal audit pemerintah lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain:

- a)Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP
- b)Sosialisasi SPIP
- c)Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Penelitian Terdahulu

Safrida (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh secara implisit belum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini terbukti banyaknya dinas di Kota Banda Aceh yang belum selesai meningkatkan pengelolaan laporan keuangan pada periode pelaporannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah sumberdaya manusia yang bukan dari latar belakang akuntansi, serta kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Dian 2014 juga melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan Safrida yaitu tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, disini perbedaan penelitian Dian dengan Safrida terletak pada tempat penelitian, bahwa hasil penelitian yang dilakukan Dian dikota pariaman menyatakan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi dan peran internal audit pada SKPD Pemerintah Kota Pariaman berpengaruh signifikan positif

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, ini disebabkan karena para pegawai pemerintahan belum seluruhnya mengerti dan mempunyai kemampuan tentang sistem informasi akuntansi keuangan yang diterapkan pada institusi pemerintahan untuk mendukung penyampaian informasi, dan juga disebabkan karena pada dasarnya sarana pendukung hanyalah sebuah alat yang tetap memerlukan peran manusia untuk menjalankannya.

Meriem (2014) melakukan penelitian tentang komitmen karyawan terhadap kualitas laporan keuangan dikota Pasuruan diperoleh kesimpulan bahwa komitmen karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan kota Pasuruan.

Selanjutnya Ricko (2012) meneliti tentang pengaruh peran internal audit, produktifitas pegawai, dan efisiensi penggunaan *software* akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Pemilihan sampel penelitian adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit, produktifitas pegawai, dan efisiensi penggunaan *software* akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Poerwadarminta (2006) Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan, dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Pada teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tersebut mengandung arti adanya hubungan paham terhadap akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Safrida (2010) menjelaskan bahawa pemahaman akuntansi menghasilkan nilai pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula. Perubahan sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang cukup dalam sistem akuntansi pemerintahan. Rendahnya pemahaman pegawai penatausahaan terhadap tugas dan fungsinya menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang mempunyai nilai bagi penggunaanya akan dapat terwujud bila pelaksana akuntansi memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan. PPK-SKPD selaku pelaksana akuntansi suatu instansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dengan didasarkan pada SAP sehingga dapat digunakan oleh PPKD untuk menyusun laporan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan seakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Hubungan Karyawan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang mendapat opini WTP perlu perbaikan, untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari karyawan dan seluruh jajarannya. Terkait opini LKPD, Opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan dan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik. Silviani (2011) melakukan penelitian tentang

pengaruh komitmen manajer pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, menyatakan bahwa kebanyakan karyawan pemerintah belum mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karyawan harus memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan, Supaya pengelolaan keuangan tersebut berkualitas maka sangat dibutuhkan campur tangan manjer pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi komitmen karyawan maka akan semakin tinggi juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

3. Hubungan Peran Internal Audit dengan Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya.

Dian 2014 melakukan penelitian pada SKPD pemerintah daerah kota pariaman, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang memiliki keandalan nilai informasi dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga

meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan semakin baik peran internal audit maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

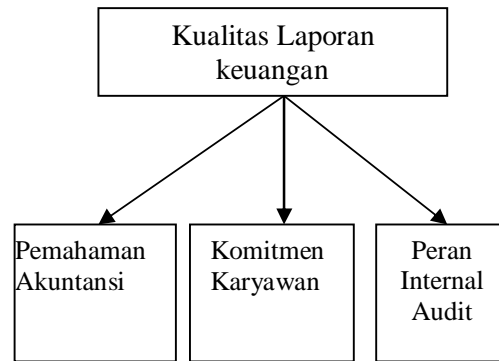
KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya adalah pemahaman akuntansi, komitmen manajer publik, dan peran internal audit.

Kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi yang tersaji dalam kualitas laporan keuangan pemerintah harus tersaji secara wajar dan transparan sebagai pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi.

Dengan adanya pemahaman akuntansi yang dimiliki maka akan menambah pengetahuan pejabat pengelolaan keuangan tentang proses dan pencatatan dalam bidang akuntansi dapat tersaji secara handal dan mudah dipahami. Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan manajer publik dalam pengambilan keputusan. Serta dengan adanya peran internal audit sebagai media penilaian yang independen dalam organisasi pemerintahan untuk mengevaluasi laporan keuangan agar terbebas dari kesalahan yang material.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:



Gambar 1
Kerangka konseptual

Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H1: Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H2: Komitmen Karyawan berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

H3: Peran Internal Audit berpengaruh signifikan positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sijunjung terdapat 32 SKPD yang terdiri dari Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor, dan Kecamatan. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek.

Responden dalam penelitian adalah kepala bagian keuangan dan staf pada SKPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing SKPD dan juga setiap bagian tersebut

merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi. Jumlah responden 60 Responden.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada populasi dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel antara lain:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah:

Pemahaman Akuntansi (X1)
Komitmen Karyawan (X2)
Peran Internal Audit (X3)

Pengukuran variabel dan instrumen penelitian

Pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan skala likert penelitian ini adalah kuesioner yang disusun sendiri.

Uji validas dan realibilitas

1. Uji Validitas

Sebelum dibagikan kuesioner kepada responden, penelitian terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan (*pilot test*) yang dilakukan pada 30 orang mahasiswa di fakultas ekonomi akuntansi. Untuk melihat validitas masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item- Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30$ adalah 0.306.

2. Uji Realibilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (handal) jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke

waktu. Sekaran (2006) menyatakan cara mengukur reliabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- b) 0,6-0,7 akseptabel
- c) 0,7-0,8 baik
- d) Lebih dari 0,8 reliabel

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ Jika $\alpha \text{ sig} > \alpha$ berarti data sampel berdistribusi normal, jika $\alpha \text{ sig} < \alpha$ berarti data sampel tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikoloniaritas

Untuk melihat adanya multikoloniaritas dilakukan dengan melihat nilai $VIF > 10$ dan *tolerance* < 0.1 berarti ada Multikoloniaritas, sebaliknya jika nilai $VIF < 10$ maka tidak terjadi Multikoloniaritas.

3. Uji heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat digunakan uji *Glejser*, dalam uji ini apabila $\text{sig.} > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pernyataan sudah dijawab lengkap oleh responden.

b. Menghitung nilai jawaban

Karena penelitian ini menggunakan data primer maka nilai jawaban dihitung dengan rumus:

$$\frac{5 \text{ SS} + 4 \text{ S} + 3 \text{ R} + 2 \text{ TS} + 1 \text{ STS}}{\text{Jumlah responden}}$$

Dimana :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu

TS = Tidak Setuju

STS= Sangat Tidak Setuju
Maka tingkat capaian responden (TCR) dihitung dengan:

$$TCR = \frac{R_s}{n} \times 100$$

2. Metode Analisis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dilihat dari *adjusted R square* yang artinya seberapa besar kontribusi variabel terikat.

b. Analisis Regresi Berganda

Untuk melihat pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sijunjung digunakan alat analisis regresi linear berganda dalam penelitian adalah:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas laporan keuangan daerah

B_{123} = Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 = Pemahaman akuntansi

X_2 = Komitmen karyawan

X_3 = Peran internal audit

a = konstanta

e = epsilon

c. Uji F

Uji model yang dilakukan adalah dengan melakukan uji F (*F-test*). Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan adalah sesuai atau tidak uji F dapat dilihat pada output ANOVA dan hasil analisis regresi linear berganda, dengan kriteria pengujian.

4. Uji t (hipotesis)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel lain adalah konstan.

hasil pengujian terhadap *t statistik* adalah:

1. Jika tingkat signifikan $< \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima

2. Jika tingkat signifikan $< 0,05$ dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis

3. Jika tingkat signifikan $> \alpha$ 0,05 dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis ditolak.

Definisi Operasional Variabel.

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah terkait dengan keterandalan laporan keuangan yang disajikan dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengukuran kualitas laporan keuangan pemerintah dalam penelitian ini adalah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi terkait dengan seberapa paham pejabat penatausahaan keuangan terhadap proses akuntansi itu sendiri. Selain itu, juga terkait dengan kesesuaian tugas dalam pengelolaan keuangan dalam laporan keuangan. Variabel pemahaman akuntansi dalam penelitian ini adalah seberapa paham pegawai dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Komitmen Karyawan

Komitmen karyawan merupakan sebagai tingkat kepercayaan dan penerimaan tentang kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi pemerintahan. Variabel komitmen karyawan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran karyawan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Peran Internal Audit

Peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Variabel peran internal audit dalam penelitian ini adalah seberapa pengaruh peran internal audit dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah populasi sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah tiga puluh dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari dinas, kantor, badan, dan inspektorat daerah. Setiap sampel masing-masing terdiri dari dua responden. Dari tiga puluh dua sampel tersebut, disebarakan sebanyak 64 kuesioner. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuisisioner yang diterima kembali sebanyak 60 kuesioner. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 60 kuesioner. Hanya 93,75% diantaranya yang mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantar langsung kepada masing-masing responden dan dijemput langsung dalam rentang waktu 17 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014.

Uji Validitas dan Realibilitas

1. Uji Validitas

Untuk uji reabilitas instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik,. Secara umum keandalan kurang dari 0,60 dinggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006:182).

Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan Cronbch's Alpha yang terdapat pada instrumen pemahaman akuntansipemahaman akuntansi 0,695 untuk instrumen komitmen karyawan 0,791 untuk instrumen peran internal audit 0,919, dan untuk kualitas laporan keuangan pemerintah 0,826. Data ini menunjukkan nilai yang berada pada kisaran 0,6. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

2. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 60$, adalah 0,371.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Colleration* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jika dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid.

Untuk instrumen pemahaman akuntansi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,326. Instrumen komitmen mnajer publik nilai terkecil 0,317, instrumen peran internal audit nilai terkecil 0,462 dan untuk kualitas laporan keuangan pemerintah dengan nilai terkecil sebesar 0,371.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,643 dengan signifikan 0,802. berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut, karena nilai signifikan dari uji normalitas $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila

tolerance value di atas 0,10 dan $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam Tabel 18 diatas menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Gletser*.

Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $sig > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas., dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Penelitian

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Dari tampilan *output* SPSS *model summary* pada Tabel 20 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,255.

Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar 25,5%, sedangkan 74,5% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Model Estimasi Regresi

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS 16.

Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,002 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$KLK = 20,077 + 0,191 PA + 0,112 KK + 0,273 PIA + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 =Pemahaman Akuntansi

X2 =Komitmen Karyawan

X3 =Peran Internal Audit

e =Standar error

Angka yang dihasilkan dalam pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 20,077 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit adalah nol maka nilai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah adalah sebesar konstansta 20,077.

b. Koefisien regresi (b) X₁

Nilai koefisien variabel X₁ yaitu pemahaman akuntansi sebesar 0,191 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan pemahaman akuntansi satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,191 dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan koefisien β dari variabel X₁ bernilai positif.

c. Koefisien regresi (b) X₂

Nilai koefisien variabel X₂ yaitu komitmen karyawan sebesar 0,112 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan komitmen manajer publik satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,112 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X₂ bernilai positif.

d. Koefisien regresi (b) X₃

Nilai koefisien variabel X₃ yaitu peran internal audit sebesar 0,273 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan peran internal audit satu satuan akan mengakibatkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,273 satuan. Nilai koefisien β dari variabel X₃ bernilai positif.

3. Uji F (F-test)

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan merupakan model tetap dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} atau membandingkan antara nilai sig dan $\alpha = 0,05$. Nilai F_{tabel} untuk $n = 60$ pada $\alpha = 0,05$ adalah 2,76. Nilai F_{hitung} adalah 7,716 sedangkan nilai signifikansi adalah 0,000. Dengan demikian, $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $sig < \alpha 0,05$.

4. Uji t (t-test)

Uji t statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara

membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$ adalah 2,003.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen pada uraian berikut ini:

a. Pemahaman Akuntansi (X₁) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,124 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,560 < t_{tabel} 2,003$. Nilai koefisien β dari variabel X₁ bernilai positif yaitu 0,191. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H₁ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan pemahaman akuntansi (X₁) berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Komitmen Manajer Publik (X₂) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,363 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,918 < t_{tabel} 2,003$. Nilai koefisien β dari variabel X₂ bernilai positif yaitu 0,112. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan tidak sesuai dengan hasil penelitian sehingga H₂ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan komitmen karyawan (X₂) berpengaruh tidak signifikan positif

terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

c. Peran Internal Audit (X_3) Berpengaruh Signifikan Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 3,821 > t_{tabel} 2,003$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,273. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan peran internal audit (X_3) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

5. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

a. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dapat dilihat dari analisis penelitian yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa nilai $sig 0,124 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,560 < t_{tabel} 2,003$. Maka dengan semakin tinggi pemahaman akuntansi tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi dan peran internal audit terhadap kualitas laporan

keuangan pada kabupaten pariaman. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupa ten pariaman.

Tidak signifikan positifnya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah dan staf pejabat pemerintah kabupaten sijunjung belum sepenuhnya paham dan mengerti tentang bagaimana cara pengelompokan bukti transaksi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sijunjung. Meskipun secara persepsi masing-masing SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataan yang ada bahwa SKPD tersebut belum mampu membuktikan bahwa masing-masing instansi tempat ia bekerja belum bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik dan pemahaman akuntansi belum sepenuhnya bisa meningkatkan keterpahaman aparatur pemerintah sijunjung dalam menganalisis bukti transaksi keuangan. Hal ini bisa disebabkan karena para aparat dan pegawai pemerintahan belum seluruhnya paham dan mengerti bagaimana mengelompokkan bukti transaksi keuangan serta menganalisis kebenarannya tentang pemahaman akuntansi.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemahaman akuntansi, dimana tingkat capaian responden rata-rata berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya aparatur dan pegawai pemerintah daerah belum bisa menerapkan pemahaman akuntansi pada lingkungan SKPD kabupaten sijunjung, sehingga belum bisa meminimalisir serta belum mampu meminimalkan hilangnya informasi yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian Safrida (2010) tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada pemerintah kota Banda Aceh). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

b. Pengaruh Komitmen Karyawan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen karyawan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dapat dilihat dari analisis penelitian yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Hasil ini membuktikan bahwa nilai $sig 0,363 > \alpha 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 0,918 < t_{tabel} 2,003$. Semakin tinggi komitmen karyawan tidak akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh silviana (2011) tentang pengaruh komitmen kepala daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah jawa barat. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa komitmen kepala daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan pendapat Sopiah (2008) yang menyatakan bahwa komitmen karyawan baik yang tinggi maupun yang rendah akan berdampak pada karyawan itu sendiri dan organisasi, karena karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat absensi berkurang dan loyalitas karyawan.

Hal ini tidak signifikan positifnya pengaruh komitmen manajer publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah daerah kabupaten sijunjung belum sepenuhnya mampu menunjukkan pertanggungjawabannya keandalan laporan keuangan pemerintah tersebut serta kurangnya kerjasama antara manajer pemerintah dengan pegawainya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataan yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik, disini komitmen manajer publik dari masing-masing SKPD belum mampu menghasilkan partisipasi aktif dari semua pihak SKPD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta meningkatkan kinerja dari masing-masing SKPD.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel komitmen karyawan, dimana tingkat capaian responden rata-rata berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya karyawan pemerintah daerah belum bisa menerapkan tanggungjawabnya dengan semestinya, dan kurangnya loyalitas karyawan terhadap organisasi pemerintah, serta minimnya efektifitas dan pengelolaan keuangan efisiensi serta belum mampu meminimalkan kurangnya komitmen yang dibutuhkan dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Nivo (2013) yang menunjukkan bahwa komitmen manajer berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Komitmen karyawan diselenggarakan untuk mendukung pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan serta mereview pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan

daerah. Komitmen berkaitan dengan kegiatan atau bertindak secara independen dalam kegiatan pelaksanaan keuangan. Dengan adanya komitmen karyawan yang tinggi bisa meningkatkan prestasi kerja dengan baik, dan bisa tercapai tujuan bersama instansi pemerintah. Oleh karena itu, karyawan harus lebih meningkatkan peran dan fungsinya dalam pertanggungjawaban atas review laporan keuangan daerah yang diterapkan dalam instansi pemerintah itu sendiri agar dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik yang sesuai SAP.

c. Pengaruh Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Semakin baik peran internal audit, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safrida (2010), penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh peran inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Adanya peran internal audit/inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan yang berkualitas dan handal. Untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh SKPD, inspektorat melakukan review terhadap laporan keuangannya. Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah itu sendiri.

Dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel peran internal audit, dimana tingkat capaian responden berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan baik. Semakin baik peran internal audit, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Safrida (2010) menguji pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banda Aceh, hasilnya menunjukkan bahwa peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman Akuntansi berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. (H_1 ditolak)
2. Komitmen karyawan berpengaruh tidak signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. (H_2 ditolak)
3. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung. (H_3 diterima)

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa namun masih beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dilihat dari model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diketahui

bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 25,5%. Sedangkan 74,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi aparatur pemerintah daerah khususnya SKPD Kabupaten Sijunjung diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang akuntansi, dan juga dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari karyawan dari masing-masing kantor Dinas, Badan dan Kecamatan yang ada di kabupaten sijunjung, serta sangat dibutuhkan peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sijunjung.

3. Bagi aparatur pemerintah daerah khususnya SKPD Kabupaten Sijunjung diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang akuntansi, dan juga dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari karyawan dari masing-masing kantor Dinas, Badan dan Kecamatan yang ada di kabupaten sijunjung, serta sangat dibutuhkan peran inspektorat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sijunjung.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pejabat pemerintah kabupaten sijunjung harus lebih optimal lagi dalam meningkatkan pemahaman akuntansi, komitmen karyawan dan peran internal audit dalam rangka meningkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun telah dilaksanakan dengan baik maka masih ada kekurangan sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten sijunjung, hal ini dapat dilihat dari demografi responden terlihat bahwa masih banyak pejabat pemerintah daerah yang masih ragu dalam mengelompokkan data akuntansi serta

bukti-bukti transaksi dalam laporan keuangan.

2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. PT Rineka Cipto: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Erlangga.
- Betty, Ratna Nureaeni. www.hariansinggalang.co.id. 23 Agustus 2013. Diakses tanggal 25 Januari 2014
- Deki, Putra. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. Skripsi. Universitas negeri Padang: Padang
- Devi, Yenita. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD*. Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Dian, Irma Diani. 2014. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pariaman. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Idris, 2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS*.

- Edisi Revisi III. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Imam, Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip: Semarang.
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.
- _____. 2006. *Audit Sektor Publik (Edisi 2)*. Penerbit Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kuntadi, Cris. 2008. *Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. www.google.com. Diakses tanggal 25 Januari 2014.
- Nivo, Wulandari. 2013. *Pengaruh partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Perangkat Daerah. Melalui (www.google.com) [23/8/2013]
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [23/08/2013]
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.
- Rezaee, Zabihollah. 2003. *The Six Legged Stool. Strategic Finance*
- Ricko, Eztavia. 2012. *Pengaruh peran internal audit, produktifitas pegawai, dan efisiensi penggunaan software akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unuversitas Negeri Padang.
- Safrida, Yuliani 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Alumni Program Magister Sains Akuntansi PPs Unsyiah. *Jurnal telaah dan riset akuntansi* Vol 3 No 2 hal 206-220.
- Sawyer, Lawrence B, 2005. *Internal Auditing*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2007). *Review Laporan Keuangan Daerah*. Tim Penyusunan Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. (2007).. STAN. 2007. *Manajemen Fungsi Audit*. STAN: Tangerang
- Silviana, 2011. *Pengaruh Komitmen Manajer Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal. Universitas Widyatama*.
- Soekidjan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Agsara
- Soemarso, SR. 1999. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Keempat. Jakarta. Rineka Cipta.
- Sopiah. 2008. *Komitmen Organisasi*. *Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2005*

Sugiyono. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. BPFE-YOGYAKARTA: Yogyakarta

The Insitute of Internal Auditor. 1999. www.google.co.id. Diakses tanggal 25 Januari 2014

Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. (2006).

Wild, John.J, Subramanyam & Robert F.Halsey. 2005. *Financial Statement Analysis*. Salemba Empat: Jakarta.

LAMPIRAN

1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	60	28	42	34.82	3.610
X2	60	22	40	32.30	3.656
X3	60	47	75	62.87	6.267
Y	60	42	55	47.47	3.846

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	60
Normal Paramet ers ^a	Mean Std. Deviation
	.0000000 3.23549395
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative
	.083 .074 -.083
Kolmogorov-Smirnov Z	.643
Asymp. Sig. (2-tailed)	.802
a. Test distribution is Normal.	

b. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.961	1.041
X2	.939	1.064
X3	.935	1.069

c. Uji Heterokedastisitas Coefficient^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.727	3.161		-.546	.587
X1	.019	.063	.040	.301	.765
X2	.014	.063	.031	.230	.819
X3	.053	.037	.195	1.446	.154

a. Dependent Variable: RES2

3. Hasil Analisa Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.541 _a	.292	.255	3.321

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

b. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.077	6.154		3.262	.002
X1	.191	.122	.179	1.560	.124
X2	.112	.122	.106	.918	.363
X3	.273	.071	.444	3.821	.000

a. Dependent Variable: Y

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	255.296	3	85.099	7.716	.000 ^a
Residual	617.637	56	11.029		
Total	872.933	59			

a. Predictors: (Constant), X3, X1X2

b. Dependent Variable: Y

